

Harian	: Radar Sulteng	Kasubaud Sulteng II
Hari, tanggal	: Senin, 21 November 2011	
Keterangan	: Halaman 14 Kolom 4-7	
Entitas	: Kabupaten Banggai	

Kebobrokan Mulai Terungkap

Haruskah PD Sulteng Dipertahankan?

BERAGAM permasalahan dan kebobrokan Perusahaan Daerah (PD) Sulteng, mulai terungkap. Satu per satu borok muncul ke publik. Mulai dari urusan penempatan direksi yang dilakukan secara politis, hingga bobroknya pengelolaan keuangan dan manajemen. Masih layakkah PD Sulteng dipertahankan? Semuanya tergantung sikap dan kebijakan Gubernur Sulteng!!!

TIM MERCUSUAR

Pasca pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, akhir Juni 2011, kisruh yang melanda PD Sulteng semakin tajam. Berbagai dugaan penyimpangan mulai terungkap. Bahkan bobroknya pengelolaan manajemen dan keuangan di PD Sulteng, menjadi perhatian khusus BPK RI. Alhasil, masing-masing pihak mulai saling tuding. Kini nasib penyelesaian masalah ini banyak bergantung dari hasil kerja DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng.

perusahaan, Zainal mengaku proses administrasi di kantor itu tetap jalan. Namun beberapa unit usaha, seperti percetakan, perbengkelan dan rental sudah tidak beroperasi. Apalagi, sambungnya, PD Sulteng sudah tidak mendapat penyertaan modal dari pemerintah sejak tahun 2008. Selain itu, PD Sulteng juga tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Sebab, beberapa manager perusahaan sudah tak lagi menjabat.

berkunjung ke kantor PD Sulteng.

Semua kegiatan PT Tompotika digerakkan langsung oleh Arifin Sunusi. Sebagai unit usaha atau anak perusahaan, seharusnya PT Tompotika memberikan laporan atau pembagian keuntungan kepada PD Sulteng, karena PD Sulteng memberikan penyertaan awal. Tapi nyatanya tidak demikian.

"Ketika ditanya, kami dihindari. Ditelpon saja dia tidak angkat," ujarnya.

Terkait dengan kedudukan Arifin Sunusi sebagai Direktur Utama di unit usaha PD Sulteng, Zainal Abduh beranggapan bahwa hal tersebut menyakhi prosedur yang ada. Menurut dia, surat keputusan (SK) pimpinan unit usaha PD Sulteng, harus ditandatangani sebagai Dirut. Namun yang terjadi pada Arifin Sunusi, SK pengangkatannya ditandatangani langsung oleh Gubernur HB Paliudju, bahkan jabatannya adalah Direktur Utama, sama persis dengan PD Sulteng sebagai induk perusahaannya.

masuk ke Palu pertamakali, mereka meminta perusahaan akan membuka rekening BCA, sehingga travel ini bisa on line dengan Garuda. Namun karena waktunya mendesak, maka saya gunakan rekening BCA saya dulu," kata Arifin.

Dia menambahkan, namun saat ini, pihaknya tengah melakukan pengalihan. Hanya saja, proses pengalihan itu butuh waktu. "Uang pribadi saya sudah tidak ada lagi di rekening itu. Jadi, uang yang ada di rekening, semuanya milik perusahaan," tuturnya.

Terkait dengan pinjaman Rp 95 juta dari PD Sulteng, Arifin mengaku telah membayar, meski secara cicil. Menurut dia, hutang PT Tompotika kepada PD Sulteng saat ini tinggal sekitar Rp 28 juta.

"Setiap saat saya memberi laporan kepada PD Sulteng. Bahkan hutang itu kalau tidak salah tinggal Rp 28 juta," ujarnya.

Sejak kisruh di PD Sulteng meruncing, Direktur Utama PD Sulteng, Zainal Abduh muki melampar "bola panas" kesana kemari. Padahal banyak permasalahan utama yang membuat PD Sulteng semakin terpuruk.

Nasib PD Sulteng sungguh memprihatinkan. Beberapa unit usaha perusahaan seperti perbengkelan, percetakan dan rental tak jalan. Yang paling parah, perusahaan masih terbebani utang sebesar Rp600 juta serta gaji karyawan tak terbayar selama satu tahun.

Direktur Utama PD Sulteng, Zainal Abduh didepan Panja Tindaklanjuti Temuan BPK Deprov Sulteng sedikit 'curhat' mengenai perusahaannya ini. Zainal membenarkan bahwa utang peninggalan Dirut lama telah mencapai Rp 600 juta. Utang itu berasal dari pinjaman Dirut Wiklan Abdul Malik kepada sejumlah pengusaha eboni, kurun waktu 2006 hingga 2009.

"Meski demikian, kami tetap mencoba membayar utang-utang itu. Sampai sekarang, utang yang sudah kami bayar mencapai Rp 91 juta," kata Zainal.

Berbeda dengan piutang perusahaan. Hingga kini, kata Zainal, PD Sulteng memiliki banyak piutang. Hanya saja, penagihannya sulit dilakukan, karena piutang tersebut telah berumur puluhan tahun.

"Waktu PD Sulteng masih mengurus eboni, banyak pengusaha yang berhutang dokumen kepada PD Sulteng. Sayangnya banyak yang belum bayar," tuturnya.

Terkait gaji karyawan, Zainal Abduh mengakui bahwa gaji karyawan sudah tidak terbayarkan sejak Oktober 2010.

"Yah, sekarang kondisinya seperti ini. Saya juga tidak bisa paksakan mereka bekerja penuh, karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya," katanya.

Ditanya tentang operasional

Dari segi kelayakan usaha, lanjut Zainal, PD Sulteng memang kalah bersaing dengan perusahaan lain. Untuk percetakan, mesin cetak PD Sulteng hanya buatan tahun 1970-an dan belum memiliki mesin potong elektrik. Berbeda dengan PNRI yang mesin cetaknya berkualitas. Terlebih lagi, PD Sulteng tidak pernah mendapat paket proyek dari pemerintah, sehingga pendapatan PD Sulteng sangat minim.

"Pada zaman Aminuddin sebagai gubernur lalu, 20 persen cetakan setiap SKPD harus diserahkan kepada PD Sulteng, sehingga waktu itu, PD Sulteng punya pendapatan bagus. Tapi sekarang ini tidak ada. Kami terakhir dapat proyek cetakan naskah UN, itu pun operasionalnya tinggi. Ya, karena keterbatasan itu tadi," sebut dia.

Sebenarnya, kata Zainal, pihaknya ingin mengundurkan diri sejak tahun lalu. Namun Gubernur Paliudju melarangnya. Dia mengaku sangat galau, karena maju tapi tak disokong dana, mundur juga dilarang.

REKENING PRIBADI

Salah satu unit usaha PD Sulteng yang masih beroperasi adalah PT Tompotika Travel. Unit usaha ini dikelola mantan Wakil Ketua DPRD Kota (Dekot) Arifin Sunusi. Sayangnya, kata Zainal, PT Tompotika tidak pernah melaporkan kegiatannya, bahkan pengoperasiannya menggunakan rekening pribadi. "Saya sebenarnya ditipu sama dia (Arifin Sunusi). Awalnya PD Sulteng memberikan modal awal untuk PT Tompotika sebesar Rp 50 juta. Lalu dia meminjam dana sebesar Rp 95 juta untuk proyek pengangkutan pejabat. Katanya, setelah proyeknya selesai, uangnya dikembalikan. Tapi sampai sekarang, pembayarannya belum lunas-lunas," keluh Zainal Abduh dihadapan Panja Tindak Lanjut Temuan BPK DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang

Awalnya Zainal membuatkan SK untuk Arifin Sunusi, namun suratnya tertahan di Biro Hukum. Ketika terbit, ternyata bukan SK yang saya tandatangi, tetapi gubernur yang saat itu dijabat HB Paliudju yang bertandatangan.

"Jadi posisi saya dengan Arifin Sunusi sama, padahal dia anak perusahaan saya. Disini letaknya, sehingga komunikasi PD Sulteng dan PT Tompotika terputus," tutur Zainal.

Anggota Panja, Baso Opu mengatakan, bila benar operasional PT Tompotika dijalankan menggunakan rekening pribadi, hal tersebut merupakan perbuatan pidana. Untuk itu, Panja dalam waktu dekat akan memanggil Arifin Sunusi dan meminta penjelasannya terkait hal itu. Panja juga meminta laporan dari PD Sulteng terkait operasional awal anak perusahaannya itu.

"Itu perbuatan pidana pak. Tolong dibuatkan laporannya. Nanti kami juga akan mengundang Arifin Sunusi," tutur Baso Opu.

BELA DIRI

Direktur Utama PT Tompotika Travel, Arifin Sunusi membenarkan bahwa operasional PT Tompotika dijalankan menggunakan rekening pribadinya.

"Itu Betul Jadi ceritanya begini. Waktu (pesawat) Garuda

MERUGI RP1 MILIAR

Kebobrokan pengelolaan keuangan di PD Sulteng ini, lagi-lagi terungkap dari hasil pemeriksaan dan menjadi temuan BPK. Temuan itu pun ditindaklanjuti oleh Panja Deprov Sulteng.

Anggota Panja PD Sulteng, Asgar Ali Djuhaepa mengatakan, selain kerugian Rp1 miliar yang diderita PD Sulteng, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKRI tahun 2010, mencantumkan bahwa Direksi PD Sulteng telah melakukan kehilangan diantaranya, telah menghilangkan 103 unit asset tanpa persetujuan gubernur, yang akhirnya merugikan keuangan daerah.

"Sesuai LHP BPK RI, PD Sulteng merugi secara kumulatif kurang lebih Rp1 miliar," ujar Asgar.

Selain itu, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 terlambat disusun. Bahkan, PD Sulteng tidak membuat RKAP tahun 2011.

Ditanyakan soal rencana Panja menindaklanjuti temuan pengelolaan unit usaha di perusahaan plat merah itu menggunakan rekening pribadi di salah satu bank, mantan staf ahli Menristek itu mengungkapkan, belum ada rencana ke arah itu. "Kita belum ada rencana ke anak perusahaan PD Sulteng," ujarnya.

Menurutnya, Panja masih akan mempelajari serta mengkaji asas legalitasnya, apakah pendirian anak perusahaan

memiliki payung hukum. Karena untuk melangkah lebih jauh, panja harus memiliki acuan payung hukum pendiriannya.

"Apakah pendirian anak perusahaan PD Sulteng berdasarkan SK Gubernur atau Perda, saya belum tahu itu," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola saat dikonfirmasi, masih enggan memberi komentar banyak tentang kisruh pengelolaan keuangan di PD Sulteng.

Dihubungi via telepon, Gubernur Longki menegaskan pihaknya masih menunggu hasil kerja dan rekomendasi dari Panja Deprov Sulteng.

"Kita pelajari dan analisa dulu hasil dan rekomendasi dari Panja DPRD. Baru kita akan menentukan langkah selanjutnya," kata Gubernur Longki.

PROSES HUKUM

Aparat penegak hukum didesak untuk segera mengusut dan memproses dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan dana

di PD Sulteng.

Direktur PBHRSulteng, Muh Masykur mengatakan, kucuran dana yang diberikan oleh Pemprov Sulteng kepada PD Sulteng selama ini, harus ditelusuri aliran penggunaan dan pengelolaannya. Apalagi ada pengakuan dari internal PD Sulteng bahwa sejumlah dana justru dikelola dengan menggunakan rekening bank milik pribadi.

"Kok. Dana daerah pakai rekening pribadi. Ini ada apa-panya. Dan pasti semua orang berfikir negatif. Apalagi kalau penggunaan dananya tidak dilaporkan. Ya kalau sudah begini, jelas ada dugaan kesengajaan dan aparat penegak hukum harus secepatnya bertindak," kata Muh Masykur.

Sebagai langkah awal membongkar praktek penyimpangan di PD Sulteng kata Masykur, Deprov segera menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, kemudian segera memberikan rekomendasi bukan hanya kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola, tapi kepada aparat penegak hukum baik Jaksa maupun polisi harus ditin-